



# JPAK

Vol. 3, Tahun ke-2, April 2010

ISSN; 2085-0743

**MEMBANGUN GERAKAN INTELEKTUAL PUBLIK**  
*Dr. Ola Rongan Wilhelmus, SF, MS*

**PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK:  
ANTARA KONSEP DASAR DAN TEKNIS  
PENDUKUNG  
PERUBAHAN KURIKULUM DALAM  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**  
*Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum.*

**MEMPROMOSIKAN PENDEKATAN  
FENOMENOLOGIS  
DALAM PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK**  
*Agustinus W. Dewantara, SS.*

**SEKOLAH KATOLIK DALAM HARAPAN  
GEREJA DAN MASYARAKAT**  
*Gabriel Sunyoto, S. Pd.*

**PEMANFAATAN MEDIA INTERNET  
DALAM KARYA PASTORAL DI PAROKI**  
*Aloysius Suhardi, S. Pd.*

**PEMBELAJARAN AGAMA KATOLIK YANG  
INSPIRATIF**  
*Antonius Tse, S. Ag.*

**Jurnal Pendidikan Agama Katolik**

Lembaga Penelitian  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teologi Katolik  
"Widya Yuwana"  
MADIUN

# **JPAK**

## **JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK**

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

### **Penasihat**

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

### **Pelindung**

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

### **Penyelenggara**

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

### **Ketua Penyunting**

Hipolitus Kristoforus Kewuel, S.Ag., M.Hum.

### **Penyunting Pelaksana**

Hardi Aswinarno, MA, Pr.  
Drs. DB. Karnan Ardijanto, MA, Pr.

### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. Tondowidjojo, CM.  
Dr. Ola Rongan Wilhelmus, SF, MS.  
Prof. Dr. Armada Riyanto, CM.

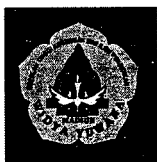
### **Sekretaris**

Gabriel Sunyoto, S.Pd.

### **Alamat Redaksi**

STKIP Widya Yuwana  
Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554  
Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober). Pendiri: Hipolitus K. Kewuel.



## DAFTAR ISI

- 02** Editorial
- 05** MEMBANGUN GERAKAN INTELEKTUAL PUBLIK  
Dr. Ola Rongan Wilhelmus, SF, MS
- 20** PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK:  
ANTARA KONSEP DASAR DAN TEKNIS PEN-  
DUKUNG PERUBAHAN KURIKULUM DALAM  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum.
- 30** MEMPROMOSIKAN PENDEKATAN FENOMENO-  
LOGIS DALAM PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK  
Agustinus Wisnu Dewantara, SS
- 40** SEKOLAH KATOLIK DALAM HARAPAN GEREJA  
DAN MASYARAKAT  
Gabriel Sunyoto, S.Pd.
- 49** PEMANFAATAN MEDIA INTERNET DALAM KARYA  
PASTORAL DI PAROKI  
Aloysius Suhardi, S.Pd.
- 59** PEMBELAJARAN AGAMA KATOLIK YANG  
INSPIRATIF  
Antonius Tse, S.Ag.

# MEMBANGUN GERAKAN INTELEKTUAL PUBLIK

Dr. Ola Rongan Wilhelmus, SF, MS

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teologi Katolik  
(STKIP) Widya Yuwana Madiun

## Abstract

Jalur pendidikan formal cenderung mencetak banyak intelektual berkelas yang ruang geraknya cenderung tidak lebih dari mimbar kuliah, seminar, dan ruang diskusi. Mereka pandai berkonsep dan bahkan menelurkan banyak teori baru. Namun, dalam dunia praktis keseharian, mereka adalah kelompok berjarak, kaum teralienasi yang asing dalam dunianya sendiri. Artikel ini memberi sumbangan pemikiran bahwa intelektual yang sejati adalah intelektual yang ada dan hadir dalam situasi konkret keseharian hidup masyarakat. Ajakan ini semakin menukik dengan dihidirkannya pemikiran tokoh-tokoh berkelas, seperti Antonio Gramsci, Ralph Waldo Emerson, dan Edward Said.

*Keywords: Intelektual Publik, Populis, Cinta Kasih, Kebenaran, Pengetahuan, Perubahan Sosial*

## Pengantar

“Semua orang bisa menjadi intelektual, tetapi tidak semua orang bisa menjalankan fungsinya di tengah masyarakat sebagai intelektual” (Antonio Gramsci. 1971). Istilah “Intelektual Publik” sering disejajarkan dengan istilah “Intelektual Populis”. Namun istilah “Populis” sering diasosiasikan dengan ideologi, wacana dan pemikiran sosial politik yang erat berkaitan dengan perlawanan masyarakat akar rumput terhadap elit politik atau penguasa. Pada titik ini istilah populis sering kali dikaitkan secara sempit dengan ideologi dan gerakan intelektual

Marxism. Penulis sendiri ingin membebaskan diri dari pandangan sempit ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah intelektual publik dan bukannya intelektual populis. Seorang intelektual publik perlu membangun hidup dan karya intelektualnya atas dasar visi dan misi tentang cinta kasih (*love*), kebenaran (*epistemology*), ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan perubahan sosial (*social change*).

Tulisan ini dibuka dengan ulasan singkat mengenai beberapa tokoh intelektual publik terkenal seperti Ralph Waldo Emerson, Antonio Gramsci dan terakhir Edward Said. Uraian tentang para tokoh ini diharapkan bisa membantu kita mengerti siapakah intelektual publik, apa misi dan visinya, bagaimana peranan dan tanggung jawab sosialnya di tengah masyarakat. Makalah ini berakhir dengan *diskurs* tentang posisi intelektual Indonesia dan strategi membangun sebuah gerakan intelektual publik.

Uraian ini tentunya diharapkan bisa memberi pencerahan tentang apa dan siapa itu intelektual publik serta peranan dan tanggung jawab intelektual publik di tengah masyarakat. Lebih dari itu tulisan ini mudah-mudahan saja menjadi batu pijakan dan dorongan bagi para sarjana untuk membangun diri menjadi seorang intelektual publik yang gemar berpikir, rajin menulis, terus melahirkan ide atau gagasan baru serta berani melakukan aksi konkret demi pelayanan dan kemajuan Gereja dan tanah air Indonesia.

## **I. Mengenal Tokoh Intelektual Publik**

### **1. Ralph Waldo Emerson**

Puluhan tahun lalu, Ralph Waldo Emerson telah menyadari arti dan fungsi intelektual. Kesadarannya ini dikemukakan dalam sebuah orasi ilmiah yang sangat terkenal saat itu yaitu: "*The American Scholar*" (Intelektual Amerika). Orasi ini disampaikan kepada komunitas intelektual Amerika yakni *the Phi Beta Kappa Society*. Dalam Orasi, Emerson menyampaikan konsep tentang "*One Man*". Kita tentu bertanya: Siapakah *One Man* itu? *One Man* ialah "manusia utuh karena terikat dengan segala potensi dan aktualitas dalam dirinya sendiri. Di sini, *One Man* bisa berarti seorang petani, professor, insinyur, imam, akademisi, negarawan, tentara dan artis. *One Man* juga berarti seorang "intelektual publik" yang selalu merangkul dan

memperjuangkan kepentingan semua anggota masyarakat setiap kali ia berpikir, bicara dan bertindak di hadapan publik. Emerson sendiri menghayati *One Man* sepanjang hidupnya (Lightman, A. 2006; Fuller, 2006).

Kegiatan terpenting seorang intelektual ialah melahirkan “ide” dan melakukan “aksi atau tindakan nyata” demi pembaharuan sosial. Intelektual tanpa aksi adalah “pengecut”. Demikian Emerson! Aksi seorang intelektual harus keluar dari kesadaran diri (*self-conscience*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) terhadap kepentingan dan kebaikan publik. Pikiran dan aksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kehidupan *One Man*. Emerson menegaskan: “*public action is part of being the One Man, the Whole Person*” (Lightman, A. 2006).

## 2. Antonio Gramsci

Ketika Gramsci dipenjarakan oleh Mussolini pada dekade 1930-an, ia memanfaatkan waktu selama di penjara untuk berpikir dan menulis pemikiran atau gagasan sekitar intelektual publik. Pemikirannya ini bisa kita baca dalam bukunya yang berjudul: *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (1971). Gramsci mengelompokkan masyarakat intelektual ke dalam dua kelompok, yaitu intelektual “tradisional” dan “organik” (publik).

Intelektual tradisional (menara gading) gemar melakukan kongsi dan aliansi dengan penguasa serta bersikap konservatif terhadap perubahan sosial. Sedangkan intelektual organik cenderung mengabdikan diri kepada perjuangan dan pelayanan demi perubahan sosial tertentu. Intelektual publik memiliki kemampuan transformatif yaitu kemampuan membuat masyarakat menjadi individual dan sekaligus warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemampuan ini muncul secara spontan dalam diri seorang intelektual seiring dengan pergerakan dan perjuangan rakyat. Intelektual organik selalu menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan bukannya bagian dari kehidupan elit dan penguasa. Ia merepresentasikan kepentingan dan penderitaan rakyat secara spontan (Gramsci, 1971).

Gramsci mengembangkan wacana tentang intelektual tradisional dan organik dalam konteks perjuangan kelas buruh/pekerja melawan kelas borjuasi. Ketika melakukan wacana tentang intelektual organik,

Gramsci mengatakan: “*All men can be intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals*” (Semua orang bisa menjadi intelektual, tetapi tidak semua orang dapat menjalankan fungsinya sebagai intelektual di tengah masyarakat) (Gramsci, 1971; Lightman, A. 2006).

### 3. Edward Said

Gagasan lebih politis tentang intelektual publik datang dari Edward Said, seorang profesor pada Universitas Colombia, Amerika Serikat. Gagasannya tentang intelektual publik dapat kita baca dalam seri kuliahnya dengan tema: “*Representation of Intellectuals*” (Representasi Intelektual) tahun 1993. Menurut Said peranan seorang intelektual di tengah masyarakat ialah mempromosi “kebebasan” dan “memajukan ilmu pengetahuan”.

Peranan ini hanya bisa dilakukan jikalau: Pertama, intelektual publik bebas dari institusi-institusi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kedua, ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat serta peka terhadap kepentingan publik. Ketiga, mampu membedakan masalah privat dan publik. Keempat, memiliki komitmen pribadi terhadap sebuah ide atau gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Lightman, A. 2006; Selligman, 1992).

## II. Hakekat Intelektual Publik

### 1. Apa Dan Siapa Itu Intelektual Publik?

Intelektual berasal dari kata Latin yaitu “*inter*” (antara) dan “*legere*” (memilih). Jadi intelektual ialah kemampuan kognitif untuk “memilih dan melihat secara cerdas, tepat dan tajam” fenomena sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menggelinding di tengah masyarakat. Sedangkan publik artinya komunitas dan masyarakat umum. Jadi intelektual publik ialah kemampuan kognitif seorang intelektual melakukan observasi, refleksi, melahirkan konsep, mengambil keputusan dan memberi alasan, serta melakukan aksi nyata demi suatu perubahan dan pembaharuan sosial tertentu. Tradisi Katolik melihat kegiatan intelektual publik seperti ini mempunyai kaitan erat dengan cinta akan kebenaran ilmu pengetahuan dan informasi serta pengabdian sejati kepada masyarakat (Mark and Lousie, 2005; Dale, Lauderdale. 2010).

Gramsci (1971) mengartikan intelektual publik (*populis*) sebagai figur yang secara terus-menerus menuangkan gagasannya kepada dunia luas, merespon berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah masyarakat serta menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi. Ia adalah seorang manusia yang suka berpikir dan bertindak demi kebaikan dan kemajuan bersama. Christopher Hitchens (2005) mengartikan intelektual publik sebagai seorang pribadi yang mencari makan dan minum dengan melibatkan diri secara aktif dalam 'perang ide' di tengah masyarakat. Ia selalu menulis dan bicara di hadapan publik demi kepentingan publik itu sendiri.

Misi seorang intelektual publik ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dan membebaskan masyarakat dari cara hidup dan berpikir sesat. Gramsci (1971) merumuskan misi intelektual publik sebagai berikut: Pertama, memajukan ilmu pengetahuan. Kedua, membebaskan masyarakat dari cara pikir sesat karena dibingkai oleh primordialisme suku, agama, etnik dan lain-lain. Ketiga, mendobrak status *quo* melalui pemikiran dan gagasan yang memerdekakan.

Meluas dan menguatnya pengaruh intelektual publik di tengah masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama, upaya dan kreativitas intelektual memperluas dan memperkuat pengaruhnya sendiri di tengah masyarakat. Kedua, kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya sesuai dengan kontribusi publik yang ia berikan (Lightman, A. 2006; Gramsci, 1971).

## **2. Peranan Dan Tanggung jawab Intelektual Publik**

### **2.1. Memiliki Komitmen**

Intelektual publik perlu memiliki komitmen kuat terhadap diri sendiri dan masyarakat luas. Istilah komitmen dalam dunia intelektual mengacu kepada kebiasaan mempertanyakan dan mengkritisi berbagai praktek kehidupan yang tidak adil dan menyimpang. Jean Paul Sartre J.P (1974) berpendapat bahwa tugas seorang intelektual publik ialah mengkritisi dan menolak segala bentuk ketidakadilan sosial serta menyuarakan kebenaran dan keadilan ketika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan di tengah masyarakat (Michel Foucault; Said, E. 2006).



## 2.2. Menjadi Mediator Dan Legislator

Zygmunt Bauman dalam *“Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals”* (1985) menekankan peranan intelektual publik sebagai legislator dan interpreter masyarakat. Ia mengamati secara kritis rasionalisasi hukum dan sistem perundangan yang mengatur tata hidup masyarakat, dan kemudian melakukan penafsiran atas sistem hukum itu dalam konteks kepentingan umum.

Seorang intelektual publik tidak berpihak atau membela status *quo* sebab status *quo* selalu cenderung melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya, ia menempatkan diri sebagai representasi dari masyarakat yang tidak bersuara dan kehilangan harapan (Foucault, M. 1991; Gramsci, A. 1971).

## 2.3. Pengendali *Civil Society*

Intelektual publik adalah pengemudi/pengendali *civil society*. John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengartikan *civil society* sebagai “masyarakat politik” yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup bersama. Menyusul, Alexis de Tocqueville (1805-1859) mendefinisikan *civil society* sebagai kondisi kehidupan dalam suatu negara di mana masyarakat sipil tidak begitu saja tunduk kepada kekuasaan negara. Hal ini terjadi karena warga negara bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang ketika menghadapi kekuasaan dan intervensi negara.

Selaras dengan pendapat Tocqueville, Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929-sekarang) lewat konsep “*a free public sphere*” (kebebasan ruang publik) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mutlak memiliki akses secara bebas dan penuh terhadap semua informasi sosial, ekonomi, politik dan budaya publik. Terciptanya kebebasan ruang publik ini merupakan kondisi mutlak demi tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil dan demokratisasi (A.F.Aniq. 2008).

Tugas dan peranan intelektual publik dalam kaitan dengan *civil society* ini ialah: Pertama, menganalisis berbagai bentuk hegemoni yang dilakukan secara fisik, melalui penjinakan budaya, ideologi, dan paket-paket kebijakan oleh pemerintah dan *multinational*

*corporations*. Kedua, memberi penerangan kepada masyarakat tentang hegemoni ini serta menggerakkan aksi massa untuk membebaskan diri dari hegemoni. Ketiga, melakukan diagnosa dan kritik atas fenomena ekonomi, politik, strategi, dan kebijakan pembangunan demi suatu perubahan dan kemajuan bersama. Keempat, mempengaruhi pola pikiran pemimpin negara dan elit politik agar mengusahakan kepentingan bersama (Pontoh, H. 2009; Said, E. 1993).

### **3. Tingkatan Hierarki Intelektual Publik**

Intelektual publik memiliki tingkatan hierarki dalam hidup. Lightman (2006) membedakan tiga level intelektual publik. *Level pertama*, seorang intelektual publik hanya bicara dan menulis untuk publik tentang disiplin ilmu yang digelutinya. Pada level ini seorang intelektual mencoba mendemostrasikan penguasaan atas disiplin ilmu yang dibidangi. Penguasaan ini terlihat dari penjelasan-penjelasan detail dan mendalam yang dibuatnya, misalnya tentang situasi ekonomi, pendidikan, politik, kemiskinan serta praktek agama yang menjadi bidang keahliannya. *Level kedua*, intelektual publik akan berbicara dan menulis tentang apa saja yang berkaitan dengan bidang keahlian serta menghubungkannya dengan realitas sosial di tengah masyarakat. *Level ketiga*, intelektual publik hanya berbicara dan menulis tentang sesuatu kalau diminta atau diundang publik. Ia bicara dan hadir untuk sesuatu yang lebih luas, melampaui disiplin ilmunya sendiri. Contoh, ketika menjadi sangat terkenal tahun 1919, Albert Einstein diminta untuk bicara kepada masyarakat luas tentang apa saja seperti agama, pendidikan, etika, filsafat, politik, dan lain-lain yang jauh berbeda dari bidang keahliannya.

Perjalanan seorang intelektual dari level pertama menuju level kedua dan ketiga pada umumnya bergerak secara perlahan-lahan. Gerakan ini meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab publik dari seorang intelektual. Langkah-langkah menuju level ke tiga (3) perlu dilewati dengan hati-hati dan diterima dengan penuh penghormatan sebab berkaitan erat dengan janggung jawab publik yang semakin besar dan luas. Intelektual publik level ke tiga (3) adalah warga negara biasa tetapi pada saat yang sama menjadi pelayan dan pemikir publik yang telah menyatu dengan jiwa

masyarakat. Ia merupakan simbol dan fenomena kehidupan publik (Lightman. A. 2006).

### **III. Posisi Intelektual Indonesia**

#### **1. Intelektual Tradisional**

Sudah sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini, banyak intelektual Indonesia memilih menjadi “intelektual tradisional” dan menjadi pejabat, gubernur, bupati, pimpinan media massa untuk kepentingan penguasa dan status *quo*. Hal ini dikarenakan sistem politik kita selama ratusan tahun di bawah penjajah dan puluhan tahun di bawah rezim Soeharto tidak memberikan ruang kebebasan dan peranan sosial kepada intelektual publik.

Di bawah pengaruh penjajah dan rezim otoriter, banyak intelektual membentuk kelas sosial tersendiri, memegang jabatan politis dan mengisolir diri dari masyarakat umum. Mereka menciptakan nilai, aturan, disiplin, dan kode etik sendiri. Pada hal banyak mereka berasal dari masyarakat biasa atau kecil. Cara hidup mereka kelihatan berbeda dengan cara hidup intelektual di Barat. Harry J Brenda dalam bukunya *Continuity and Change in Southeast Asia* (1972) mengemukakan bahwa di Barat, kaum intelektual tidak membentuk kelas sosial tersendiri, tetapi menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

#### **2. Perlu Kehadiran Intelektual Publik**

Indonesia merupakan negara yang tengah memperjuangkan demokrasi, reformasi, keadilan sosial dan keterbukaan. Dalam perjuangan ini kita sangat memerlukan perspektif kritis dari intelektual publik. Bryan S. Turner (2005) berpendapat bahwa kehadiran intelektual publik di tengah masyarakat berkembang (seperti Indonesia) sangat dibutuhkan untuk membangun perspektif kritis tentang demokrasi, keadilan sosial, kekuasaan dan lain-lain. Sebuah perubahan sosial (bahkan revolusi) di tengah masyarakat hanya bisa terjadi kalau ditopang dan digagas oleh intelektual publik.

Pada masa perjuangan menuju kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki banyak kaum intelektual. Tetapi hanya sedikit saja yang mengabdikan diri kepada perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Mereka itu antara lain Bung Karno, Bung Hatta dan Syahrir, Tan

Malaka dan H.O.S. Cokroaminoto. Sebagai intelektual publik (*populis*), mereka lebih suka memilih hidup di penjara, dibuang, dan diasingkan demi kemerdekaan masyarakat dan bangsa Indonesia (A.F. Aniq. 2008; Muzakki, Akh. 2009).

### 3. Posisi dan Gerakan Intelektual Saat Ini

Sampai dengan akhir tahun 1980-an banyak intelektual kita menempatkan diri sebagai intelektual tradisional. Tetapi sejak awal tahun 1990-an sejumlah intelektual kita mencoba menempatkan diri sebagai intelektual reformis atau sosial-demokratis untuk mendukung program reformasi yang ditiupkan di tanah air. Intelektual reformis mencoba mengambil posisi intelektual berseberangan dengan posisi intelektual Marxism (Marxism hampir tidak nampak di Indonesia, kecuali misalnya Amerika Latin, dll). Intelektual reformis dan marxism masing-masing mempunyai pandangan berbeda tentang: 1) Transisi Menuju Demokrasi; 2) Kerangka Politik Elektorial; 3) Identitas Gerakan; 4) Pemimpin Negara dan Politik; dan 5) Globalisasi. Tentang demokrasi, intelektual reformis berpendapat bahwa perubahan sosial khususnya transisi menuju demokrasi ditandai oleh pergeseran kekuasaan dari militer ke politisi sipil melalui hasil pemilu. Legalisasi partai politik, kebebasan pers, pemilihan umum dan kebebasan individual merupakan prasyarat untuk kemajuan demokrasi. Mereka yakin bahwa perubahan pesat bisa terjadi dan berlangsung secara bertahap. Perubahan ini akan menghasilkan keadilan sosial secara menyeluruh (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Pandangan ini bertolak belakang dengan padangan intelektual Marxism yang menegaskan bahwa keberlanjutan struktur kelas, aparaturnegara (militer, pengadilan, badan intelegen, bank sentral) serta keputusan lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan penentu kebijakan sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu bangsa. Kerangka kerja politik, sosial, ekonomi dan budaya berada dalam posisi subordinant dari lembaga-lembaga negara, kaum kapitalis dan *mutinational corperations*. Situasi seperti ini tidak akan membawa perubahan malainkan menciptakan status *quo* dan ketergantungan masyarakat terhadap kapitalis dan status *quo* (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Berkaitan dengan politik elektoral, intelektual reformis yakin bahwa politik elektoral merupakan instrumen perubahan sosial. Sistem politik elektoral juga akan meningkatkan standar hidup dan kemakmuran, mempromosikan pembangunan nasional, dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti perumahan, lapangan kerja dan renasionalisasi ekonomi (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008). Dalam kenyataan, politik reformasi gagal menjalankan misinya karena persoalan politik uang dan kegagalan memilih pemimpin negara dan politik berkualitas. Kegagalan itu terjadi antara lain karena pemilihan umum lebih mengandalkan kekuatan uang dari pada pengalaman, kinerja, dan integritas pribadi seorang pemimpin.

Intelektual Marxism menilai bahwa politik elektoral tidak bisa berfungsi karena semakin bergantung pada paket kebijakan yang dipaksakan dari luar. Hal ini membuat situasi sosial, politik, dan ekonomi menjadi semakin buruk. Politik elektoral mengakibatkan sebagian besar perusahaan milik negara terjual atau jatuh ke tangan asing, dan ratusan miliar Dollar dirampas dari tangan buruh untuk ditransfer ke bank-bank asing untuk membayar utang luar negeri. Sistem politik elektoral menunjukkan dominasi kelas yang luar biasa (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Sejak akhir tahun 1980-an intelektual reformis mencoba merumuskan identitas baru perjuangan mereka (menggantikan identitas kelas) dan menjadikannya sebagai basis gerakan sosial. Identitas ini terlihat dari gerakan-gerakan sosial yang mereka lakukan dengan basis ekologi, etnis, dan feminis. Identitas baru ini juga ternyata belum dan bahkan tidak bisa membawa perubahan sosial. Akibatnya agenda gerakan sosial mereka menjadi kacau dan dipertanyakan. Sementara itu, intelektual Marxism terus memperjuangkan gerakan dan pembaharuan sosial yang berbasis kelas sebagaimana terjadi di Amerika Latin (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Intelektual reformis umumnya mendukung para pemimpin reformis (sosial-demokrat) dengan agenda atau paket pembaharuan yang dipaksakan dari luar. Hasil yang dicapai juga sangat buruk karena para pemimpin yang didukung intelektual reformis ternyata berubah menjadi neoliberalis. Para pemimpin itu dipaksakan untuk memperluas investasi asing, privatisasi, mengakomodir undang-undang ketenagakerjaan yang memasung buruh dan hak pensiunnya, serta memaksakan

standar upah umum terbatas. Para intelektual Marxistism menolak para politisi dan pemimpin reformis karena mereka adalah boneka IMF dan multinational corporations (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Dalam kaitan dengan globalisasi, intelektual reformis yakin bahwa watak dan motor penggerak kapitalisme globalisasi ialah terciptanya sebuah tata dunia baru yang didominasi oleh multinational corporations. Karena itu kaum reformis melawan globalisasi dengan cara menggalang pertemuan dengan massa dalam jumlah yang sangat besar tetapi tidak mengandung muatan kelas. Sebaliknya, analisis intelektual marxistism mengatakan bahwa dunia sekarang ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan militer imperialis Amerika, Eropa dan Jepang untuk mengontrol dunia. Kebangkitan militer imperialis global ini ditandai dengan kebijakan negara *imperialism* dan *multinational corporations* yang menelopori perang secara agresif dan melakukan ekspansi kapitalis di Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Kolumbia, Nepal, dll (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

Dalam hubungan dengan konseptual-teoritis, intelektual reformis sangat menekankan pentingnya analisis yang mengutamakan gerakan massa dan bukan analisis kelas. Sebaliknya intelektual Marxistism lebih mengutamakan analisa dan diagnosa kelas. Belakangan ini analisis intelektual Marxistism lebih mengena dan valid, dan karena itu lebih diterima masyarakat akar rumput (Pontoh, H. 2009; A.F.Aniq. 2008).

#### **IV. Strategi Membangun Gerakan Intelektual Publik**

Gerakan intelektual publik bisa dimulai dengan langkah (strategi) konkret seperti membentuk komunitas intelektual, menentukan posisi intelektual komunitas, menguasai jaringan kekuasaan, dan memanfaatkan jasa teknologi komunikasi dan internet.

##### **1. Membentuk Komunitas Intelektual Publik**

Komunitas intelektual adalah sekelompok intelektual yang memiliki komitmen, cita-cita hidup, tujuan, dan semangat yang sama yaitu mengabdikan hidup dan kemampuan intelektualnya untuk merespon berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan keamanan secara cerdas dan tepat demi suatu perubahan sosial atas dasar cinta kasih dan kebenaran.

Mark and Lousie (2005) mengatakan bahwa sebuah komunitas intelektual perlu dibangun atas dasar visi tentang cinta kasih (*love*), kebenaran (*epistemology*), ilmu pengetahuan (*knowledge*), dan perubahan sosial (*social change*). Sementara itu misi komunitas intelektual ini ialah memberi pencerahan publik melalui kajian kritis dan analitis terhadap berbagai isu aktual serta melakukan tindakan nyata demi kemajuan, kesejahteraan, damai, dan keadilan masyarakat.

## **2. Menentukan Posisi Intelektual Komunitas**

Langkah berikutnya dalam membangun gerakan intelektual publik ialah menentukan posisi intelektual dari komunitas bersangkutan. Apakah komunitas intelektual ini berafiliasi dengan perspektif Marxism, Neo-Marxism, Critical Theory, Constructivisme, Postmodernisme, dan Reformism (Social Demokrat) atau aliran-aliran lainnya. Penentuan posisi intelektual ini sangat penting karena berkaitan erat dengan identitas ilmiah dan perspektif seorang intelektual.

Setelah menentukan posisi intelektual, seorang intelektual perlu mendalami perspektif itu dan memakainya sebagai *framework* untuk menganalisis berbagai fenomena sosial seperti demokrasi, pemilu, ekonomi pasar bebas, pemimpin negara dan partai politik, globalisasi, lokalisasi dan lain-lain.

## **3. Menggalang Kerjasama Dengan Elemen *Civil Society***

Kehadiran berbagai LSM, Forum, Asosiasi dan Jaringan di Indonesia merupakan bagian penting dari kemajuan *civil society*. Komunitas intelektual hendaknya menjadi bagian dari LSM, Forum dan Asosiasi karena hal ini akan memperkuat serta memperluas peranan dan pengaruh intelektual publik di tengah masyarakat.

## **4. Menguasai Jaringan Kekuasaan/Kekuatan**

G. William Domhoff (1981) mengatakan bahwa posisi dan peranan intelektual publik di tengah masyarakat akan semakin kuat bila ia menguasai dan mempengaruhi empat (4) jaringan kekuatan/kekuasaan sosial yaitu ideologi, ekonomi, militer, dan politik. Keempat jaringan ini perlu dikuasai mengingat perubahan yang terjadi di tengah masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan ini.

Kekuatan ideologi diwakili oleh agama, kepercayaan, dan budaya. Sementara itu kekuatan politik diwakili pemerintah dan penguasa politik. Kekuatan ideologi dan politik merupakan dua kekuatan terbesar dan selalu saling memanfaatkan. Sebagai contoh, ketika sebuah kerusuhan sosial terjadi di tengah masyarakat maka para penguasa politik dipastikan meminta bantuan pemimpin agama untuk menanganinya. Sayangnya, ketika para pemimpin agama mengkritisi kebijakan atau keputusan politik tertentu maka para penguasa politik pasti akan mengatakan bahwa “politik bukanya urusan agama”.

#### **5. Memanfaatkan Jasa Teknologi Komunikasi Dan Internet**

Kemajuan komunikasi teknologi serta kehadiran internet sangat membantu pengembangan intelektual publik dan *civil society*. Singh Vaidhyanathan (1999) mengungkapkan bahwa belum pernah ditemukan moment sebagus saat ini untuk menjadi seorang intelektual dengan bantuan internet.

Kehadiran internet tidak hanya memperlancar hubungan sosial, tetapi juga membaharui dan bahkan mengubah pola hubungan sosial. Peluncuran dan penanganan berbagai “websites” secara profesional akan mengantar hasil diskusi, percakapan, dan perdebatan intelektual ke tengah masyarakat luas dengan maksud memberi perspektif dan pencerahan kepada mereka.

#### **Penutup**

Indonesia adalah negara berkembang yang tengah bergelut dengan persoalan demokrasi, reformasi, dan keadilan sosial. Dalam perjuangan ini kita sangat membutuhkan perspektif kritis dari intelektual publik tentang demokrasi, keadilan sosial, kekuasaan dan kesejahteraan masyarakat. Sebuah perubahan sosial hanya bisa terjadi di Indonesia kalau digagas dan ditopang para intelektual publik.

Mengingat pentingnya kehadiran intelektual publik itu maka kita memerlukan usaha dan langkah konkrit membangun intelektual publik. Langkah konkrit itu ialah: Pertama, membentuk komunitas intelektual; Kedua, menentukan posisi intelektual komunitas. Ketiga, menggalang kerja sama dengan elemen-elemen *civil society*. Keempat, menguasai jaringan kekuasaan. Kelima, memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi dan internet.



Menjadi seorang intelektual publik artinya melahirkan pikiran dan gagasan, menulis dan berbicara secara terus menerus di hadapan publik untuk membangun perspektif kritis bagi masyarakat, serta melakukan tindakan konkret demi perubahan sosial. Kita memerlukan intelektual yang memiliki kepekaan, kesadaran pribadi dan tanggung jawab atas kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan publik. Dan bukannya intelektual yang berpihak pada status quo serta mengisolir diri dari pengalaman hidup sehari-hari masyarakat.

## KEPUSTAKAAN

- Ahmad Fathan Aniq. 2008. *Civil Society Dan Masyarakat Madani: Antara Mitos Dan Realitas*. Dalam: Majalah AFKAR PCI NU Mesir Edisi XLVI Bulan Juni 2008.
- Bauman, Z. (1987), *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals*. Cambridge: Polity.
- Brenda J. Harry. 1972. *Continuity and Change in Southeast Asia*. Sage Publication: New York.
- Dale, Launderville. 2010. *Love and Knowledge: The Heart of the Catholic Intellectual Tradition*. The Sacred Hart University: Connecticut, USA.
- Freud, S. (2002), *Civilizations and Its Discontents*, London
- Fuller, S. (2006), "The Public Intellectual As Agent of Justice: In Search For a Rezime". Dalam: Philosophy and Rhetoric, Vol. 39(2): 147-156.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York. Free Press
- Linghtman, Alan. 2006. *The Role of Public Intellectual*. Paulist Press: New York, USA.

- Mark and Lousie. 2005. *The Catholic Worker Movement: Intellectual and Spiritual Origins*. Paulist Press: New York, USA.
- Muzakki, Akh. 2009. *Ulama Dan Fungsi Intelektual Organik*. Harian Republika, Jumat 30 Januari 2009
- Osborne, T. (2004), "On Mediators: Intellectuals And The Ideas Trade In The Knowledge Society", *Economy and Society*, Vol. 33(4): 430-447.
- Pontoh, Husain. 2005. *Peranan Intelektual Dalam Perubahan Sosial (The Role of Intellectuals in Social Change*. Dalam: <http://www.rebellion.org>.
- Said, Edward (1993). *Representasion of Intellectuals*. Colombia University: USA.
- Selligman, A. (1992), *The Idea of Civil Society*. New York: The Free Press, hal. 5.
- Turner, B.S. (2006), "British sociology and public intellectuals: Customer Society And Imperial Decline". Dalam: *The British Journal of Sociology*, Vol. 57(2): 169-188.
- Vaidhyanathan, S. (2006), "The Lessons of Juan Cole," dalam *Chronicle of Higher Education*, July 28, 2006.

## **PERSYARATAN PENULISAN ILMIAH DI JURNAL JPAK WIDYA YUWANA MADIUN**

01. Jurnal Ilmiah JPAK Widya Yuwana memuat hasil-hasil Penelitian, Hasil Refleksi, atau Hasil Kajian Kritis tentang Pendidikan Agama Katolik yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di Majalah/Jurnal Ilmiah lainnya.
02. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris sepanjang 7500-10.000 kata dilengkapi dengan Abstrak sepanjang 50-70 kata dan 3-5 kata kunci.
03. Artikel Hasil Refleksi atau Kajian Kritis memuat: Judul Tulisan, Nama Penulis, Instansi tempat bernaung Penulis, Abstrak (Indonesia/Inggris), Kata-kata Kunci, Pendahuluan (tanpa anak judul), Isi (subjudul-subjudul sesuai kebutuhan), Penutup (kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka.
04. Artikel Hasil Penelitian memuat: Judul Penelitian, Nama Penulis, Instansi tempat bernaung Penulis, Abstrak (Indonesia/Inggris), Kata-kata Kunci, Latar Belakang Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup (kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka
05. Catatan-catatan berupa referensi disajikan dalam model catatan lambung.  
Contoh: Menurut Caputo, makna religius kehidupan harus berpangkal pada pergulatan diri yang terus menerus dengan ketidakpastian yang radikal yang disuguhkan oleh masa depan absolut (Caputo, 2001: 15)
06. Kutipan lebih dari empat baris diketik dengan spasi tunggal dan diberi baris baru.  
Contoh: Religions claim that they know man an the world as these really are, yet they they differ in their views of reality. Question therefore arises as to how the claims to truth by various religions are related. Are they complementary? Do they contradict or overlap one another? What –according to the religious traditions themselves—is the nature of religious knowledge? (Vroom, 1989: 13)
07. Kutipan kurang dari empat baris ditulis sebagai sambungan kalimat dan dimasukkan dalam teks dengan memakai tanda petik.  
Contoh: Dalam kedalaman mistiknya, Agustinus pernah mengatakan “saya tidak tahu apakah yang saya percayai itu adalah Tuhan atau bukan.” (Agustinus, 1997: 195)
08. Daftar Pustaka diurutkan secara alfabetis dan hanya memuat literature yang dirujuk dalam artikel. Contoh;  
Tylor, E. B., 1903. Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Ert, and Custom, John Murray: London  
Aswinarno, Hardi, 2008. “Theology of Liberation As a Constitute of Consciousness,” dalam Jurnal RELIGIO No. 1, April 2008, hal. 25-35.  
Borgelt, C., 2003. Finding Association Rules with the Apriori Algorithn, <http://www.fuzzi.cs.uni-magdeburg.de/~borgelt/apriori/>. Juni 20, 2007  
Derivaties Research Unicorporated. <http://fbox.vt.edu.10021/business/finance/dmc/RU/content.html>. Accessed May 13, 2003